

# bulletin bpk sdm

BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM



**7** Fenomena Pelayanan  
Air Minum di Indonesia

**12** Implementasi 'Good  
Governance' dalam  
Penyelenggaraan  
Pendidikan Profesional  
Kedinasan  
PUSBIKTEK

**15** Rapat Kerja BPKSDM  
"Perlunya Sinkronisasi dan  
konsolidasi Program TA.  
2006

## Dari Redaksi

Edisi keempat Bulletin BPKSDM ini menampilkan artikel mengenai kegiatan Konstruksi Indonesia 2005 yang diselenggarakan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Dalam kegiatan ini telah digelar kegiatan Pameran Konstruksi dan Pendukungnya, Dialog Konstruksi, Penerbitan Buku Konstruksi Indonesia, dan Penghargaan Karya Konstruksi. Kegiatan Konstruksi Indonesia ini merupakan kesinambungan dari tahun sebelumnya yang juga dijadikan sebagai momentum dalam menumbuhkan apresiasi terhadap peran industri dan jasa konstruksi pada sektor perekonomian serta berbagai aspek kehidupan sosial budaya masyarakat. Melalui kegiatan Konstruksi Indonesia ini telah diberikan penghargaan kepada tokoh konstruksi nasional: Ir. Sutami, Federic Silaban, dan Wiryatman Wangsawinata, dan juga penghargaan lainnya untuk kategori Karya Jurnalistik dan Foto Konstruksi.

Selain itu artikel yang disajikan dalam bulletin ini mengangkat mengenai fenomena pelayanan air minum di Indonesia. Dalam artikel tersebut dibahas mengenai kondisi per-air-minum-an di Indonesia, perbandingan dengan negara tetangga, hambatan dalam pengembangan pelayanan air minum, dan saran-saran untuk peningkatan pelayanan air minum yang dalam hal ini antara lain berupa diperlukannya komitmen yang kuat dari masyarakat dan pemerintah untuk menyelenggarakan pembangunan bidang air minum dan sanitasi, diperlukannya penyempurnaan peraturan perundangan yang terkait, dan saran lainnya yang terkupas lengkap dalam artikel tersebut.

Berita lain yang juga ditampilkan pada edisi ini adalah mengenai penerapan "Good Governance" dalam penyelenggaraan Pendidikan Professional Kedinasan PUSBIKTEK, dimana dalam penyelenggaraannya bersifat kemitraan sehingga diperlukan penerapan model manajemen yang mengacu kepada kesetaraan, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas publik, kepastian hukum, visi bersama, orientasi pada mufakat, serta efektif dan efisien.

Berita lain yang juga tak kalah menarik mengangkat mengenai perkembangan teknologi pembangunan Jembatan Bentang Panjang di Indonesia dan pelatihan hukum kontrak konstruksi.

Selamat membaca edisi keempat Bulletin BPKSDM ini, semoga dapat menambah informasi Anda. Dan dari Redaksi mengucapkan Selamat Tahun Baru 2006!.



Departemen Pekerjaan Umum dengan departemen terkait lainnya pada tanggal 1-3 Desember 2005 telah

menyelenggarakan kegiatan Konstruksi Indonesia 2005, acara ini diselenggarakan di Gedung Sapta Taruna Departemen Pekerjaan Umum. Penyelenggaraan Konstruksi Indonesia 2005 ini berdasarkan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 465/KPTS/M/2005, yang diselenggarakan dengan tema "Mendorong Industri Konstruksi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional". Acara yang diselenggarakan meliputi kegiatan Pameran Konstruksi dan Pendukungnya, Dialog Konstruksi, Penerbitan Buku Konstruksi Indonesia 2005, dan Penghargaan Karya Konstruksi yang meliputi Penghargaan Terhadap Tokoh Konstruksi, Lomba Foto Konstruksi, Kompetisi Karya Jurnalis Konstruksi.

Penyelenggaraan Konstruksi Indonesia 2005 yang merupakan kesinambungan semangat Konstruksi Indonesia pada tahun sebelumnya, telah mendorong Departemen Pekerjaan Umum untuk menjadikan Konstruksi Indonesia 2005 sebagai momentum dalam menumbuhkan apresiasi terhadap peran industri dan jasa konstruksi pada sektor perekonomian serta berbagai aspek kehidupan sosial budaya masyarakat, dan juga menjadi dasar pemikiran untuk melembagakan kegiatan Konstruksi Indonesia.

Dalam menunjang kegiatan Konstruksi Indonesia 2005 ini telah dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain seperti launching kepada para Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah serta asosiasi-asosiasi pelaku bisnis jasa dan industri konstruksi, talkshow pada station-station TV, talkshow

# KONSTRUKSI INDONESIA



pada station Radio, iklan layanan masyarakat, internet, press release press conference, iklan bersama pada media cetak.

Sebagai awal yang menandai pelaksanaan penyelenggaraan Konstruksi Indonesia 2005 ini, pada hari Rabu (26/10) telah digelar acara Launching Konstruksi Indonesia 2005 yang bertempat di Departemen PU. Dalam acara tersebut, Menteri

**Pembina/Pelindung :** Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM, **Penanggung Jawab :** Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM,

**Wakil Penanggung Jawab :** Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi, Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi, Kepala Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi, Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi,

**Pemimpin Redaksi :** Dra. Surtiningsih, **Redaksi Pelaksana :** Nanan Abidin, S.Kom,

**Anggota Redaksi :** Ir. Mochamad Natsir, M.Sc, Drs. Deddi Rudiana, MM, Ir. Mahbullah Nurdin, MM, Ir. Tri Djoko Waluyo, M.Eng.Sc, Ir. Eddy Sunyoto, MSc, Ir. Sari Mustika, Dipl.HE, Agus Muryanto, Dipl.ATP, Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng.Sc, Ero, S.Pd, Cakra Nagara, ST,MT, Dra. Agnes S.P. Trisnowati, MPA, Dra. Nanik Rubijatn, Drs. Basri, Dra. Titik Murti Utami, Subagio, Yanto Apriyanto,

**Administrasi dan Distribusi :** Sri Yuliawati, B.Sc, Agus Firingadi, **Desain/Tata letak :** Nanang Supriyadi, **Photografer :** Sri Bagus Herutomo

# KONSTRUKSI INDONESIA 2005



Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto memberikan sambutannya yang diwakilkan oleh Inspektur Jenderal Departemen PU Wibisono Setiowibowo. Beliau mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan momentum baik bagi peran industri dan jasa konstruksi menuju peningkatan kompetensi dalam menghadapi era globalisasi.

Pada kesempatan tersebut juga dikatakan bahwa para pelaku jasa dan industri konstruksi perlu selalu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar mampu berkarya secara efisien dan produktif dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan tersedianya infrastruktur publik yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Selain itu, pelaku jasa dan industri konstruksi dituntut kesiapannya menghadapi liberalisasi perdagangan barang/jasa agar mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Untuk itu penerapan sistem manajemen mutu yang berstandar internasional yakni ISO 9001:2000 yang diadopsi SNI 19-9001:2001 menjadi suatu keharusan bagi perusahaan konstruksi.

Dengan menerapkan ISO tersebut diharapkan dunia jasa konstruksi nasional akan dengan mudah berkalah di pasar global di sektor jasa konstruksi, walaupun masih diakui bahwa pemerintah masih menghadapi masalah dan tantangan dalam

mengembangkan sektor ini seperti tingginya tingkat suku bunga bank yang saat ini mencapai 14-15%

Menteri PU menilai, kondisi seperti itu yang menjadikan pelaku jasa konstruksi nasional sulit bersaing dengan kontraktor asing untuk mendapatkan proyek dalam negeri sendiri. Dikatakan, prediksi dari Bappenas menyebutkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 5-6% dibutuhkan investasi di bidang infrastruktur sekitar Rp 700 triliun. Padahal, kontraktor nasional sebagian besar masih memburu proyek pemerintah yang porsinya hanya 40%. Untuk memburu sisa proyek (60%) diperlukan persaingan super ketat dengan kontraktor asing di dalam

negeri. Dengan kenyataan bahwa komposisi penyedia jasa konstruksi nasional 80% nya adalah perusahaan golongan kecil yang tidak memiliki tenaga ahli kompeten, maka diperlukan kesiapan masyarakat penyedia jasa konstruksi untuk menjadi profesional dan peningkatan kompetensi tenaga ahli dan tenaga terampil. Menteri PU juga mengakui untuk menghadapi persaingan regional dan global, kontraktor kita sangat membutuhkan dukungan perbankan, asuransi dan peran arbitrase yang bisa menjamin kelancaran penyelenggaraan konstruksi. Sehingga kita dapat mengikuti jejak Singapura, Malaysia dan Piliphina yang telah meraih pangsa proyek konstruksi di luar negeri.





bangunan konstruksi lain, disamping tidak berdampak negatif pada lingkungan serta bermanfaat bagi masyarakat.

Sutami merupakan seorang pelopor penerapan beton pracetak dalam pembangunan jembatan Semanggi dan pelopor penggunaan metoda perhitungan konstruksi beton, berintegritas dan berdedikasi tinggi dalam menggeluti ilmu pengembangan wilayah, dan juga sebagai pelopor penggunaan metoda inkonvensional dalam karya-karya monumentalnya.

Silaban, arsitek yang dipercaya membangun Masjid Istiqlal yang amat monumental dan sudah menjadi salah satu landmark Indonesia. Hasil karya dan buah pemikiran Silaban berupa kubah Masjid Istiqlal bahkan telah diakui Universitas Darmstad, Jerman Barat sebagai hak cipta Silaban, sehingga disebut sebagai Silaban Dome atau Kubah Silaban.

Wiratman Wangsadinata merupakan insan konstruksi yang sangat konsisten dan serius dalam perkembangan konstruksi di tanah air. Salah satu pekerjaan penting yang ditanganinya adalah Jalan tol Jagorawi yang merupakan jalan tol pertama di Indonesia. Selain itu, beliau juga banyak berkiprah dalam pembangunan waduk di seluruh pelosok tanah air sejak tahun 1960, diantaranya waduk Sempor.

Pada acara launching Konstruksi Indonesia 2005 ini juga, Kepala BPKSDM, Iwan Nursyirwan mengatakan bahwa dalam pameran nanti akan ditampilkan teknologi baru, teknologi konstruksi tepat guna, dan peluang investasi di bidang konstruksi yang diikuti Departemen PU bersama departemen lainnya, BUMN Karya, Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi, kontraktor swasta dan pemasok lokal serta asing. Sedangkan pada acara dialog, diharapkan dapat mempertemukan industri konstruksi, pemerintah serta pihak terkait lainnya dalam mencari solusi atas masalah yang dialami dunia konstruksi untuk disampaikan kepada para penentu kebijakan.

konstruksi nasional, yaitu Ir. Sutami (mantan Menteri PU), Federic Silaban dan Wiryatman Wangsawinata. Karya Jurnalistik dimenangkan oleh Harian Kompas, Bisnis Indonesia dan Investor Dailly. Sedangkan Pemenang Foto Konstruksi diraih oleh Shandi Irawan, Muhammad Ali dan Sofyan Effendi untuk kategori Foto Hitam Putih. Sedang untuk Kategori bebas dimenangkan oleh Aziz Indra, Arie Basuki, Suhartono, sementara Juara Favorit diraih oleh Jurnasyanto. Penghargaan Karya Konstruksi tersebut dianugerahkan kepada tokoh konstruksi yang mampu menghasilkan karya rancang bangun yang handal, inovatif dan memberikan inspirasi pada

Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pelaksanaan Konstruksi Indonesia 2005 adalah menandai tumbuhnya kegiatan konstruksi di Indonesia sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air, mendorong upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme pelaku konstruksi nasional serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pelaku konstruksi nasional dalam menghasilkan produk-produk konstruksi.

Melalui kegiatan Konstruksi Indonesia 2005 ini telah diberikan penghargaan terhadap tokoh







menyerahkan award kepada wakil Gubernur Sumatera Utara atas prestasi Kota Medan meraih kategori terbaik dalam penyelenggaraan air minum kota metro/ besar. Untuk penyelenggaraan air minum kota sedang/ kecil diraih oleh Kabupaten Buleleng.

Kota Yogyakarta meraih 2 penghargaan yakni kategori penyelenggaraan sanitasi kota metro/ besar dan kategori penataan kawasan kumuh perkotaan kota metro/ besar. Untuk kategori pembinaan bangunan gedung kota metro/ besar diraih oleh kota Surabaya, sedangkan untuk kategori pembinaan bangunan gedung kota sedang/ kecil dimenangkan oleh kota Bukittinggi. Untuk kategori penyelenggaraan jasa

konstruksi propinsi, Propinsi Sumatera Barat mengungguli 10 Propinsi lain.

Adanya penyelenggaraan Konstruksi Indonesia 2005 ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya khususnya bagi masyarakat industri dan jasa konstruksi maupun bagi segenap masyarakat luas pada umumnya. ♦

Disamping pemberian penghargaan tersebut diatas, Departemen Pekerjaan Umum juga menyelenggarakan Penilaian terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan wajibnya, seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya di bidang pekerjaan umum. Hasil penilaian tim juri yang melibatkan unsur pemerintah pusat, perguruan tinggi, organisasi profesi, serta organisasi kemasyarakatan telah menetapkan 12 pemenang untuk 12 kategori. Penyerahan award ini diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum kepada para pemenang pada saat acara Malam Konstruksi Indonesia 2005 & Penghargaan Pekerjaan Umum yang disiarkan secara live oleh Metro TV Sabtu (3/ 12) dan yang ditayangkan ulang di TVRI tanggal 6 Desember 2005. Dengan adanya pemberian ini diharapkan akan mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pekerjaan umum.

Pemenang untuk kategori penyelenggaraan jalan dan jembatan diraih oleh propinsi Propinsi Jawa Timur, kategori penyelenggaraan penataan ruang kota metro/ besar dimenangkan oleh kota Balikpapan, kategori penyelenggaraan

penataan ruang kota sedang/ kecil dimenangkan oleh kota Gorontalo, dan kategori penyelenggaraan penataan ruang kota khusus kawasan pariwisata diraih oleh Kota Kuta.

Dalam acara itu, Menteri Pekerjaan Umum menyerahkan award kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur Imam Utomo untuk kategori pengelolaan irigasi propinsi. Dengan penghargaan itu, Propinsi Jawa Timur meraih 2 award. Selain itu, Menteri PU juga





Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia pada saat ini sedang menyelenggarakan Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi, pelatihan ini merupakan hasil kerja sama antara Departemen Pekerjaan Umum dengan Universitas Indonesia. Rencananya Pelatihan ini akan dilaksanakan dalam 2 gelombang, masing-masing dilaksanakan selama 65 hari kerja. Gelombang I pelaksanaannya mulai dari tanggal 6 Desember 2005 sampai dengan 4 April 2006, sedangkan Gelombang II rencananya akan dilaksanakan mulai pertengahan bulan April 2006 sampai dengan bulan Juli 2006.



Pelatihan ini diikuti sebanyak 43 peserta yang berasal dari seluruh Satminkal di Departemen PU. Pengajar dalam pelatihan ini berasal dari Universitas Indonesia dan Asosiasi Provesi Advokat. Pelatihan ini tidak hanya ditujukan khusus kepada para sarjana teknik yang berada di lingkungan Departemen PU saja, namun juga ditujukan bagi sarjana-sarjana lain yang latar belakang pendidikannya berbeda. Termasuk di dalamnya Sarjana Hukum, karena walaupun sudah memiliki dasar-dasar ilmu hukum, namun masih banyak hal-hal yang perlu dipelajari dalam penyusunan kontrak, dalam hal ini khususnya kontrak konstruksi, dimana terdapat banyak aspek-aspek teknis yang belum dikenal. Contohnya bentuk-bentuk kontrak konstruksi seperti design construct/build, Build Operate and Transfer (BOT), atau aspek perhitungan biaya seperti Fixed Lump Sum Price / Unit Price yang mungkin akan terdengar awam dikalangan sarjana non teknis.

Adapun maksud diselenggarakannya Hukum Kontrak Konstruksi adalah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia di Departemen Pekerjaan Umum, khususnya meningkatkan pemahaman dalam bidang penyelenggaraan kontrak konstruksi.

Pemahaman terhadap bidang kontrak mutlak dibutuhkan, karena Departemen PU banyak terlibat dalam kegiatan pembuatan maupun pelaksanaan kontrak itu sendiri. Terlebih lagi mengingat adanya tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap peran Departemen PU dalam Pembinaan Konstruksi, dimana dalam bidang usaha konstruksi,

permasalahan dalam bidang kontrak cukup mendominasi. Baik itu permasalahan dalam tahapan penyusunan kontrak, pelaksanaan butir-butir yang telah disepakati pada kontrak, sampai dengan penyelesaian sengketa kontrak.

Selain hal tersebut di atas masih ada faktor lain yang menjadi dasar pertimbangan mengapa dilaksanakannya pelatihan hukum kontrak di Departemen PU, faktor tersebut adalah minimnya SDM Departemen PU yang benar-benar menguasai teknik penyusunan kontrak yang memenuhi persyaratan secara hukum. Hal tersebut dikarenakan mayoritas SDM Departemen PU berlatar belakang pendidikan teknik. Dengan dasar tersebut di atas Departemen Pekerjaan Umum, melalui Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM melaksanakan kegiatan Pelatihan Hukum Kontrak dengan tujuan untuk menciptakan SDM yang profesional yang menguasai bidang Hukum Kontrak.

Materi yang diberikan pada pelatihan ini meliputi materi-materi dasar di bidang hukum seperti :

- Pengantar Ilmu Hukum;
- Pengantar Hukum Indonesia;
- Hukum Perdata;
- Hukum Perikatan;
- Penyelesaian sengketa;
- dsb.

Selain materi-materi yang terkait dengan bidang hukum, dalam pelatihan ini juga di berikan materi yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak ditinjau dari segi teknis, dalam hal ini khususnya pelaksanaan kontrak di ruang lingkup pekerjaan Departemen PU. Contohnya materi

yang berkaitan dengan prosedur lelang pengadaan barang dan jasa konstruksi.

Melalui cakupan materi di atas, diharapkan lulusan pelatihan ini akan mempunyai suatu kompetensi inti dalam hukum kontrak konstruksi yang diindikasikan dengan kemampuan dalam :

1. memahami berbagai jenis kontrak yang digunakan dalam penyelenggaraan konstruksi;
2. menguasai struktur substansi dokumen kontrak konstruksi;
3. memahami landasan hukum penyelenggaraan konstruksi;
4. menguasai berbagai terminologi dalam hukum kontrak konstruksi,;
5. menguasai aspek hukum dalam penyelenggaraan kontrak konstruksi;
6. menyelesaikan permasalahan dalam penerapan berbagai jenis kontrak dalam penyelenggaraan konstruksi;
7. mengembangkan wawasan terkait dengan aspek hukum kontrak konstruksi;
8. dapat menyelesaikan suatu kasus yang terkait dengan aspek hukum kontrak konstruksi.

Adapun harapan akhir dari dilaksanakannya pelatihan hukum kontrak konstruksi ini adalah terciptanya SDM Departemen PU yang mampu menghadapi tantangan dalam penyusunan suatu kontrak, yakni : menyusun kontrak yang mudah dimengerti, dapat dilaksanakan dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik, sehingga di masa datang diharapkan tidak terdapat lagi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat kesalahan dalam penyusunan kontrak. ♦



yang termasuk sumber air minum yang baik berdasarkan Biro Pusat Statistik adalah air ledeng (sistem perpipaan), sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung dan air hujan. Jadi sangat perlu dipertimbangkan lagi prosentase penduduk yang memiliki akses air minum, karena tingkat degradasi lingkungan yang terjadi di Indonesia serta perilaku masyarakat secara keseluruhan serta tingkat kesadaran terhadap lingkungan yang masih rendah maka sumber air selain ledeng sangat riskan dari pencemaran, sehingga pekerjaan rumah untuk pencapaian target MDG menjadi besar dan biaya yang diperlukan juga tidak sedikit, selain itu hak asasi seluruh warga Negara Indonesia akan akses air minum makin lama terpenuhi.

Kita semua bersyukur dengan telah ditetapkannya Undang-undang no. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sehingga dapat dipakai untuk menyusun peraturan perundangan dibawahnya yang lebih operasional untuk pengembangan dan penyediaan air minum. Pada bulan Maret 2005 ternyata telah ditetapkan juga Peraturan Pemerintah no. 16 tahun 2005 tentang Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagai amanat dari Undang-undang no. 7 dan kita patut gembira karena dalam pasal 37 peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa "Pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan peraturan perundangan".

Adanya rasa optimis dengan adanya peraturan perundangan yang mendukung pengembangan pelayanan air minum belum disertai dengan gerakan nyata di lapangan, sehingga rasa pesimis bahwa Indonesia tidak akan mencapai target MDG, dapat terlihat dari gerakan pembangunan peningkatan akses terhadap air minum bagi kawasan rawan air dan miskin yang diprogramkan dari dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak misalnya untuk tahun 2004 dari total Rp 5,2 triliun, tetapi

## 1. Latar belakang.

Berdasarkan ketetapan yang ada di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), bahwa hak atas air merupakan hak yang dinyatakan secara eksplisit dalam konvensi tentang hak anak dan secara implisit dalam konvensi Universal tentang Hak Azasi Manusia dan Perjanjian Internasional untuk Hak-hak Sipil dan Politik. Pada tahun 2002 PBB menyatakan bahwa akses terhadap air merupakan hak asasi yang fundamental, sehingga Negara-negara anggota mempunyai kewajiban hukum untuk segera merealisasikan hak atas air tersebut termasuk penyesuaian terhadap peraturan dan perundangan yang terkait. Lebih jauh bisa dijelaskan bahwa hak atas air mencakup; satu, hak atas kecukupan, keterjangkauan, dan dapat di akses, aman, serta dapat diterima secara fisik, baik untuk pribadi maupun untuk kegunaan rumah tangga, dua, meliputi hak untuk mempertahankan akses. yang sudah ada dan bebas dari campur tangan pihak manapun.

Pada bulan September 2000 dalam acara World Summit telah disepakati oleh 189 negara anggota PBB tentang Millenium Development Goals (MDG) yang terdiri dari 8 tujuan, 18 target dan lebih dari 40 indikator, dan salah satu targetnya adalah "Mengurangi separuh penduduk yang belum mempunyai akses terhadap air minum dan sanitasi yang sehat pada tahun 2015". Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian target tersebut adalah

proporsi penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air yang baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Adapun definisi akses sesuai Global Water Supply and Sanitation Assessment 2000 Report (WHO/ UNICEF) adalah akses kepada ketersediaan air minum minimal 20 liter/orang/hari dengan jarak pengambilan tidak lebih dari 1 kilometer. Berdasarkan pengalaman di Indonesia tingkat konsumsi sebesar 20 liter/orang/hari hanya cukup untuk minum dan memasak, sedangkan rata-rata kebutuhan minimal masyarakat di Indonesia termasuk untuk mandi, oleh karena itu tingkat konsumsi minimal berkisar antara 20- 30 liter/orang/hari.

## 2. Kondisi per-air minum-an di Indonesia.

Angka-angka di Biro Pusat Statistik (BPS) sampai tahun 2003, menjelaskan bahwa besarnya cakupan penduduk yang memiliki akses kepada air minum yang baik di Indonesia sebanyak 77,65 % penduduk dan sisanya tidak memiliki akses kepada air minum. Angka pencapaian 77,65 % menggambarkan akses air minum yang baik di Indonesia sudah cukup bagus, namun hanya 17,03 % penduduk yang mendapatkan pelayanan air minum dari sistem perpipaan, dan di beberapa propinsi cakupan akses air minum masih dibawah 60 % penduduk seperti di Bangka Belitung, Kalsel, Kalbar, Bengkulu, Kalteng dan Papua. Perlu juga dicermati bahwa





hanya Rp 250 milyar saja yang diprogramkan untuk pembangunan sarana air bersih yang berbasis masyarakat. Program tersebut di mulai tahun 2001 dan berakhir tahun 2004 dengan total dana Rp 804 milyar dan tambahan penduduk yang terlayani air bersih kurang lebih 4,25 juta orang. Pada tahun 2005 program serupa tetap dilakukan dan disalurkan melalui sistem Daftar Alokasi Khusus (DAK) dengan total anggaran sebesar Rp 203,5 milyar, dengan kata lain belum ada peningkatan yang berarti atau keberpihakan pada pengembangan pelayanan air minum masih biasa-biasa saja. Selain program tersebut terdapat pula program peningkatan sarana dan prasarana air bersih bagi kawasan urban dan setiap tahunnya dianggarkan rata sebesar Rp 350 milyar dengan tambahan rata-rata penduduk terlayani air bersih sebesar 2,5 juta per tahun, bahkan untuk tahun 2005 hanya teralokasi sebesar Rp 270 milyar. Pemerintah daerah Propinsi yang mengalokasikan dana untuk pengembangan bidang air minum baru terdapat di propinsi-propinsi yang ada di Pulau Jawa saja sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota baru sedikit yang m e n g a n g g a r k a n n y a . Fenomenanya akan lain bila dibandingkan dengan bidang transportasi, misalnya untuk pembangunan jalan lingkar pemerintah Kabupaten/Kota termasuk DPRD nya sangat antusias untuk segera mewujudkannya walaupun harus menganggarkan dana APBD puluhan milyar rupiah untuk pembebasan tanahnya.

Selain dari segi dana pembangunan, juga para pengelola sarana air minum di kawasan perkotaan atau Perusahaan Daerah

Air Minum (PDAM) mempunyai kendala dalam biaya operasional sehari-hari karena ada kecenderungan yang terus meningkat disebabkan oleh naiknya tarif listrik, biaya pengolahan air bersih karena tingkat pencemaran di sumber air baku meningkat dan kehilangan air yang relatif masih tinggi, serta sumber daya manusia yang masih perlu penanganan yang baik.

### **3. Pembelajaran dari Negara tetangga.**

Dibandingkan dengan Negara miskin lainnya Indonesia sudah jauh tertinggal, misalnya Vietnam. Bidang air minum di Vietnam mengalami kemajuan tidak lain karena kebijakan pendanaan pembangunan yang memihak sehingga memudahkan untuk pengembangan pelayanan air minum. Jika pengelola air minum sudah dapat mencapai cakupan pelayanan tertentu dan mempunyai perencanaan untuk mengembangkannya maka pemerintah Vietnam menanggung resiko kurs 2% atas pinjaman luar negerinya, selain itu juga diberikan keringanan pajak dan tidak dipungut kontribusi sampai tingkat keuntungan yang ditetapkan. Di Negara kita justru pemerintah mengenakan tambahan resiko kurs sebesar 4 %, sehingga PDAM harus memikul bunga keseluruhan pinjaman sebesar 11 %

Jika dibanding Vietnam saja kita sudah ketinggalan apalagi dengan Thailand, dimana di Negara tersebut kegiatan pengembangan air minum ditetapkan sebagai prioritas utama, sehingga tidak mengherankan 22 pengelola fasilitas pelayanan air minumnya dalam kondisi sehat dan sangat baik serta rata-rata produksinya dapat langsung di minum dari kran. Di Thailand rakyat miskin di subsidi dari pemerintah, sehingga pendapatan Pengelola air minum tidak berkurang, hal ini terwujud dengan cara si pelanggan dari penduduk miskin harus mempunyai surat keterangan kurang mampu dari pemerintah daerahnya, sehingga pelanggan tersebut hanya

membayar sebagian saja sedangkan sisanya dibayar pemerintah daerah.

Hal senada disampaikan juga oleh Erna Witoelar selaku Duta Besar Khusus PBB untuk MDG pada bulan Januari 2004 bahwa di bidang air minum dan sanitasi Indonesia memang terlambat dibandingkan Negara-negara lain, bahkan tertinggal dibandingkan dengan Vietnam, Butan dan Kamboja. Bila santai-santai saja sangat berat untuk mencapai target MDG, namun bila Indonesia berhasil memanfaatkan momentum dan saling mendukung untuk mencapai sasaran MDG, maka peluangnya menjadi besar.

### **4. Hambatan dalam pengembangan pelayanan air minum.**

Untuk pencapaian target MDG, tidak terlepas dari ketersediaan air baku, karena betapapun primanya kinerja PDAM, kalau debit air baku semakin menurun dan semakin kritis kondisinya maka PDAM akan sulit untuk mengembangkan pelayanannya agar bisa mencapai target MDG. Sebagai contoh misalnya di kawasan Tangerang yang mengandalkan Sungai Cisadane sebagai air baku untuk persawahan, industri, maupun untuk air minum dan kegiatan lainnya. Dari neraca air sungai Cisadane khususnya pada bulan Agustus dan September ternyata antara debit andalan yang ada dengan kebutuhan air, jumlah kebutuhan lebih besar sehingga kurang memungkinkan untuk digunakan lagi bagi pengembangan pelayanan air minum di kawasan tersebut, padahal kebutuhan nyata sesuai hasil survey diprediksi tambahan kebutuhan air minum sampai 2015 sebanyak 1900 l/ detik untuk daerah Ciparen, Sepatan, Cileduk, dan Benda. Dalam rangka menutupi kekurangan air baku di kawasan Tangerang perlu segera dibangun waduk baru seperti waduk Karian dan Tanjung yang berarti masih memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar.

Jadi dengan adanya peraturan dan perundangan seperti disebutkan dimuka tidak otomatis urusan air baku untuk air minum menjadi tidak ada kendala, bahkan di sisi lain saat ini banyak ormas agama meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak Undang-Undang Sumber



Daya Air. Beberapa alasan yang mereka kemukakan ialah bahwa dalam undang-undang tersebut terbuka peluang sumber-sumber air dikuasai oleh institusi swasta atau perorangan, bukan oleh Negara seperti yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, dan mereka juga mengemukakan bahwa air adalah rahmat dari Allah kepada manusia, sehingga air adalah salah satu hak hakiki manusia, bahkan mereka juga mengatakan bahwa air yang datang dari langit adalah karunia Tuhan dan digunakan untuk kehidupan manusia bukan untuk diperdagangkan.

Status kelembagaan untuk pengelola air minum masih belum memperoleh status yang jelas dan hingga hari ini masih dalam tahap penelaahan oleh pemerintah, untuk itu sudah harus dipertimbangkan dimulainya unit pengelola yang bersifat regional agar dapat beroperasi lebih efisien yang akhirnya masyarakat akan diuntungkan. Sebagai contoh untuk kasus ini adalah di daerah Propinsi Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Pasuruan, disana terdapat mata air yang besar namanya Umbulan dan mempunyai debit kurang lebih 4000 l/detik. Perencanaan untuk pemanfaatannya telah dibuat sejak tahun 1982 namun mata air tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan, dan potensi yang dapat digunakan sebagai air baku untuk minum kurang lebih 3000 l/detik yang berarti bisa melayani kurang lebih 1,5 juta penduduk di kawasan Pasuruan, Surabaya dan

mungkin juga Gresik. Rencana tersebut hingga kini belum terealisasi karena belum adanya Kebijakan yang prioritas dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah serta kekakuan birokrasi dan peraturan perundangan yang kurang mendukung. Jadi selama kurang lebih 20 tahun Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah menunda kesejahteraan rakyat di kawasan Surabaya dan sekitarnya.

## 5. Saran-saran.

Penulisan singkat ini bukan mengajak para pembaca untuk pesimis menghadapi masa depan pelayanan air minum, tetapi ini adalah fakta yang realistis tentang peta buram pelayanan air minum di Indonesia dan mari bersama-sama berfikir dan bertindak agar target MDG di Indonesia dapat terwujud dengan baik sehingga hak asasi masyarakat akan akses air minum dapat terlaksana, Amin.

Penulis perlu menyampaikan saran, pertama, harus adanya komitmen yang kuat dari masyarakat dan pemerintah untuk memprioritaskan penyelenggaraan pembangunan bidang air minum dan sanitasi, kedua, Pemerintah harus menyempurnakan peraturan perundangan yang terkait dengan air minum, ketiga, Pemerintah berusaha untuk menetapkan sistem pembiayaan yang murah bagi penyelenggaraan pembangunan bidang air minum misalnya mengupayakan bunga pinjaman yang rendah sebesar 2- 3 %



keempat, Pemerintah perlu menetapkan pola subsidi bagi masyarakat miskin agar dapat mengakses air minum yang sehat dan aman, terakhir, perlu adanya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait baik di Pusat maupun di daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan air minum dan sanitasi.

## Pustaka:

1. Konsep Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan berbasis Lembaga (Ketiga-Desember 2004)
2. National Action Plan bidang air minum, Ditjen Kotdes Dep. Kimpraswil.
3. Catatan Saksi Ahli Charles A. Santiago, pada risalah pengujian UU no.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
4. Priyono Salim, Butir-butir pokok mengenai pelayanan dan penyediaan air minum, Februari 2005.
5. Majalah bulanan Perpamsi, 2004. ♦

*Penulis* : Sekretaris BPKSDM.

**Seluruh Pimpinan Dan Staf  
Badan Pembinaan Konstruksi Dan Sumber Daya Manusia**

*mengucapkan*

**Selamat Tahun Baru  
2006**

## Menteri PU Membuka Pameran Konstruksi 2005

3 Desember 2005



Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia  
(BPKSDM)

## Juara II Lomba Gerak Jalan pada acara Hari Bhakti PU,

3 Desember 2005





**Pelatihan Penanganan  
Tata Perpustakaan dan Kearsipan**



**Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi**



**Penutupan  
Pameran  
Konstruksi  
Indonesia  
2005**



**Pelatihan Peningkatan  
Kemampuan Pemahaman  
Aparatur Pembina Konstruksi  
dalam Menunjang Tugas dan  
Fungsi BPKSDM**

**Rapat Kerja Badan Pembinaan  
Konstruksi dan Sumber Daya  
Manusia**





### A. Pengertian Umum 'Good Governance'.

Perubahan paradigma dari 'government' kearah 'governance' prinsipnya menekankan tentang pentingnya kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara sektor publik, sektor swasta dan masyarakat. Perubahan paradigma ini mengisyaratkan adanya pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan tata pemerintahan yang baik (good governance). Paradigma Good Governance menekankan arti penting kesetaraan antara institusi Negara, swasta, dan masyarakat. Bahkan bagi institusi swasta paradigma ini mengisyaratkan pentingnya peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pembangunan. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai dampak globalisasi yang ditandai revolusi di bidang telekomunikasi, transportasi dan turis manca Negara telah mendorong munculnya tuntutan gencar yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk segera merealisasikan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan masyarakat tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya ditanggapi pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan yang terarah bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, termasuk dalam hal penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat.

Kata 'good' dalam 'good governance' mengandung arti: Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak masyarakat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pencapaian



## Implementasi 'Good Governance' Pendidikan Professional

Oleh: Nana Rukmi

tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan tersebut. Secara spesifik UNDP mendefinisikan 'governance' sebagai "the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a country's affairs at all levels of society" (Dharma Setyawan, 2004: 224). Oleh karena itu, UNDP memberikan definisi 'good governance' sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara sektor publik (pemerintah), sektor swasta dan masyarakat. Karakteristik 'good governance' menurut UNDP yakni: 1) Partisipasi; 2) Penegakan hukum; 3) Transparansi; 4) Responsif; 5) Orientasi terhadap konsensus; 6) Kesamarataan; 7) Efisiensi dan

Efektivitas; 8) Akuntabilitas; 9) Visi Strategis.

### B. 'Good Governance'

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan. Menurut Santosa (2000: 86) dalam Dharma Setyawan (2004: 225), sebuah 'governance' dikatakan baik (good and sound) apabila sumber daya dan masalah-masalah publik diselenggarakan secara efektif dan efisien, dimana ia merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, perwujudan 'good governance' harus tercermin dalam penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada aspirasi masyarakat (putting customer first). Pengelola pendidikan harus mengenali siapa pelanggannya, dan dari informasi pelanggan ini akan lebih memahami aspirasi dan



## nce' dalam Penyelenggaraan Kedinasan PUSBIKTEK

na D. Wirapradja

kebutuhan masyarakat yang menjadi segmen sasaran kegiatannya. Penyelenggaraan pendidikan kedinasan yang efektif dan efisien harus mengacu pada kepentingan masyarakat yang kompleks dan terus berubah di masa-masa yang akan datang serta harus dapat menyerap aspirasi anggota masyarakat. Dalam hal ini pelanggan utama (customer) adalah Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten di seluruh Indonesia serta unit-unit kerja dalam lingkungan internal Departemen Teknis.

Khusus dalam rangka kerjasama kemitraan dengan Perguruan Tinggi, ada beberapa prinsip 'good governance' yang sangat diperlukan dalam kerjasama kemitraan ini antara lain Kesetaraan, Keterbukaan

(transparansi), Profesionalitas, Akuntabilitas Publik, Kejelasan aturan main (kepastian hukum), Adanya visi bersama, Orientasi pada mufakat serta Efektif dan Efisien. Masing-masing prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Kesetaraan, dimaksudkan masing-masing instansi yang bermitra harus menempatkan diri dalam posisi yang sejajar, baik dalam melaksanakan kewajiban maupun memperoleh kesempatan dan hak dalam kerjasama; 2) Keterbukaan, dalam pengertian masing-masing mitra memiliki kebebasan memperoleh/ mengetahui informasi dan proses pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama untuk kepentingan bersama. Menurut Tony Lendrum (2003: 317), paradigma baru kemitraan antara lain harus 'shared information for mutual benefit';

3) Profesionalitas dimaksudkan masing-masing mitra harus melaksanakan program dan kegiatannya sesuai standard kualitas yang disepakati; 4) Akuntabilitas publik artinya masing-masing mitra harus secara bersama-sama dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan kepada publik, khususnya berkenaan dengan kualitas lulusan pendidikan profesional yang akan terjun ke dunia kerja dan masyarakat; 5) Kejelasan hukum/ aturan dimaksudkan agar aturan yang ditetapkan bersama dalam rangka kemitraan ini harus adil bagi semua pihak, masing-masing dapat memperoleh 'reward' dan 'punishment' sesuai hasil kerja dari masing-masing mitra. Hal ini biasanya dicantumkan secara terinci dalam kontrak kerjasama kemitraan. Menurut Tony Lendrum (2003: 317), tidak ada istilah kemitraan tanpa diikat dengan kesepakatan (No-contract, no term relationship or equivalent). 6) Adanya visi bersama, dimaksudkan agar masing-masing mitra merumuskan bersama-sama tentang visi kemitraan untuk kepentingan bersama; 7) Orientasi pada mufakat dimaksudkan agar musyawarah dan mufakat merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam mencapai tujuan kemitraan; 8) Efisien dan efektif artinya proses dan pelaksanaan program kemitraan harus dapat mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang sehemat mungkin.

Khusus dalam proses belajar dan mengajar (PBM) yang dilaksanakan dalam kerjasama kemitraan ini juga harus dapat mencerminkan pelaksanaan prinsip-prinsip 'good governance' yang dapat dirangkum dalam 6 (enam) prinsip yakni: 1) Kejujuran Intelektual, dalam PBM harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran akademis; 2) Tanggung Jawab Profesional, antara lain materi pembelajaran harus dapat dipertanggung jawabkan secara profesional, produk pembelajaran

harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai kaidah-kaidah keilmuan; 3) Keterbukaan, yakni hak karyawan untuk memperoleh informasi secara proporsional; 4) Kesetaraan Perlakuan, antara lain memperhatikan prinsip kesetaraan bagi semua karyawan, semua karyawan harus diperlakukan sama, baik dalam memperoleh hak, kesempatan, maupun dalam menunaikan tugas dan kewajiban; 5) Responsive yakni harus tanggap terhadap kebutuhan karyawan; 6) Efektif dan Efisien yakni dalam proses PBM harus dapat mencapai hasil optimal dengan memanfaatkan sumber daya karyawan seoptimal mungkin. Dalam upaya mengimplementasikan prinsip efektif dan efisien dalam kerjasama penyelenggaraan pendidikan professional kedinasan ini perlu menerapkan konsep Manajemen Mutu Terpadu.

Manajemen Mutu Terpadu (MMT) atau lebih dikenal dengan Total Quality Management (TQM) merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk mengoptimalkan kualitas kinerja lembaga/ organisasi melalui perbaikan yang terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya (Fandy Tjiptono, 2000:4). Definisi kualitas sendiri nampaknya belum ada yang dapat diterima secara universal, namun ada beberapa kesamaan persepsi tentang elemen-elemen kualitas, yakni: Pertama, kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan; Kedua, kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan; Ketiga, kualitas merupakan kondisi yang dinamis, apa yang dianggap merupakan kualitas yang baik saat ini, mungkin dianggap kurang berkualitas di masa yang akan datang. Berdasarkan elemen-elemen tersebut, kualitas nampaknya merupakan suatu kondisi yang selalu berubah (dinamis) serta berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang

memenuhi atau melebihi harapan pelanggan (customer). Deming (1928) menjelaskan bahwa kualitas dapat dicapai melalui perbaikan proses. Perbaikan atau peningkatan kualitas proses akan meningkatkan keseragaman output/ produk, mengurangi duplikasi/ overlapping dalam pekerjaan serta berbagai kekeliruan/ kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan, mengurangi pemborosan tenaga kerja, waktu dan material serta peningkatan output dengan usaha yang minimum. Manajemen kualitas perguruan tinggi yang berfokus pada peningkatan kinerja terhadap berbagai dimensi kualitas penyelenggaraan pendidikan dapat difasilitasi dengan sejumlah model implementasi. Pakar di bidang pendidikan, Yin & Yan (1997) telah mengidentifikasi tujuh model kualitas pendidikan (model kemitraan) yang dapat diadopsi, diadaptasi atau dipadukan oleh setiap institusi pendidikan dalam rangka menyempurnakan kualitasnya yakni: 1) goal and specification model; 2) resource-input model; 3) process model; 4) satisfaction model; 5) legitimacy model; 6) absence of problems model, dan 7) organizational learning model.

Nampaknya dalam manajemen pendidikan berbasis kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan kedinasan perlu mengadopsi atau menggabungkan keseluruhan model tersebut karena model yang dikembangkan harus dapat meningkatkan efektivitas dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pendidikan mulai dari Input, Proses dan Output. Model yang dikembangkan perlu memperhatikan karakteristik Manajemen Mutu Terpadu yakni: (1) Fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal (karyawan) maupun pelanggan eksternal (instansi pengutus) ; (2) Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas; (3) Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah; (4) Memiliki komitmen jangka panjang; (5) Membutuhkan kerjasama tim (teamwork); (6) Memperbaiki proses secara berkesinambungan (continuous improvement); (7) Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia; (8) Memiliki kesatuan tujuan. ♦

Bandung, November 2005

**Penulis** : Kepala Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi, BPKSDM.







RAPAT KERJA BPKSDM

## Perlunya Sinkronisasi dan Konsolidasi Program TA. 2006



ada akhir tahun 2005 ini, Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia telah mengadakan Rapat Kerja yang dihadiri oleh seluruh pejabat di jajaran unit terkait. Rapat kerja ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Sinkronisasi dan Konsolidasi Program TA. 2006 yang telah diselenggarakan oleh Badan Pembina Konstruksi dan Sumber Daya Manusia.

Dalam Rapat Kerja ini dibahas antara lain mengenai evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2005 yaitu mengenai penetapan kinerja dan pencapaian kerja, dan juga dibahas mengenai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2006.

Dalam pembahasan evaluasi kegiatan tahun 2005 ini, Kepala BPKSDM, Iwan Nursyirwan

mengemukakan mengenai perlunya penyelesaian LAKIP Eselon II untuk dapat diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 4 Januari 2005, sehingga Lakip BPKSDM yang merupakan LAKIP untuk eselon I ini diharapkan telah dapat diterapkan pada pertengahan Januari 2006.

Selanjutnya juga disampaikan bahwa pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan Tahun

Anggaran 2005 untuk kegiatan Swakelola dan Kontraktual perlu segera disiapkan untuk mengantisipasi pemeriksaan lanjutan oleh Inspektorat Jenderal, yang direncanakan pada bulan Januari 2006.

Mengenai masalah IKMN, Kepala BPKSDM, Iwan Nursyirwan menyampaikan bahwa perlunya pembenahan terhadap aset-aset Departemen Pekerjaan Umum terutama mengenai penanganan dan penyelesaian permasalahan aset-aset di lingkungan Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia baik yang berbentuk aset bangunan maupun aset tanah seperti yang terjadi di Balai Semarang, Balai Keahlian Teknik Palembang, Balai Suratmo, dan tempat lainnya.

Disamping itu disampaikan juga untuk tahun anggaran 2006 Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 156,92 Milyar, dimana dana ini dialokasikan sebesar Rp. 40,65 Milyar untuk Sekretariat, Rp. 8,05 Milyar untuk Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi, Rp. 11,45 Milyar untuk Pusat



Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi, Rp. 42,17 Miliar untuk Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi, dan Rp. 54,6 Miliar untuk Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi. Namun yang masih menjadi perhatian yaitu penyebaran alokasi dana ini sebagian besar masih terpusat di Pusat, belum menyebar merata ke daerah, sehingga dikatakan perlunya pengkajian ulang untuk dapat diketahui apakah memang benar kegiatan untuk daerah seperti balai-balai memang perlu ditangani oleh Pusat.

Dana yang telah dialokasikan ini mempunyai komposisi sebesar 31% yang bersifat kontraktual, 25% administrasi, dan 44% swakelola untuk unit kerja Sekretariat, 47% kontraktual, 4% Administrasi, dan 49% untuk unit kerja Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi, 27% Kontraktual, 7% Administrasi, dan 66% Swakelola untuk unit kerja Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi, 20% Kontraktual, 27% Administrasi, dan 53% Swakelola untuk unit kerja Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi, dan yang terakhir untuk unit kerja Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi yaitu sebesar 8% yang bersifat Kontraktual, 17% Administrasi, dan 75% Swakelola.

Rapat Kerja yang dihadiri oleh para pejabat di lingkungan BPKSDM dari eselon II sampai dengan eselon IV dan para Kepala Balai ini telah menghasilkan suatu usulan mengenai perlunya penyesuaian terhadap indikator kinerja dan perlunya tambahan indikator

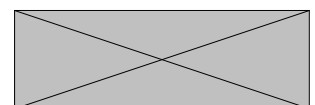


kinerja output serta pencapaian Indikator Kinerja yang tertuang dalam LAKIP Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia.

Disamping itu melalui Rapat Kerja tersebut, telah ditekankan perlunya Pusat-Pusat untuk memperhatikan bagan alir DIPA, PO serta revisi, dan juga agar pusat-pusat segera membuat jadwal Rencana Kerja, dan Ringkasan TOR yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat mengacu sesuai dengan arahan Bapak Menteri

kegiatan kontraktual maupun swakelola harus bermanfaat bagi pengembangan infrastruktur PU dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhir Rapat Kerja ini, Kepala BPKSDM, Iwan Nursyirwan, menutup Rapat Kerja ini dengan mengemukakan perlunya untuk mensinkronisasikan, mengkoordinasikan, dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan antara unit kerja yang ada di lingkungan Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia. ♦



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.